



**Judul** : Diungkap BPK dalam Laporan IHPS I 2023 - Pengadaan Vaksin PMK Diduga Rugikan Negara Rp 75,7 Miliar  
**Tanggal** : Rabu, 31 Januari 2024  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 8

## Diungkap BPK Dalam Laporan IHPS I 2023

# Pengadaan Vaksin PMK Diduga Rugikan Negara Rp 75,7 Miliar

**Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali mengungkap sejumlah pengadaan bermasalah di Kementerian Pertanian (Kementerian). Temuan tersebut, yakni adanya kelebihan bayar dalam pengadaan material eartag (tanda pengenal ternak) tahap II dan III pada Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak.**

TEMUAN lain, yakni pengadaan vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tahap II dan III. Kedua pengadaan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian pada tahun 2022. BPK menemukan adanya kelebihan bayar dalam pengadaan tersebut, sehingga berpotensi merugikan negara sebesar Rp 75,7 miliar.

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menilai, temuan potensi kerugian negara dalam dua pengadaan tersebut perlu disikapi serius. Sebab, ini sangat terkait dengan penggunaan uang negara. Jangan sampai kelebihan bayar untuk dua pengadaan itu disengaja sehingga duit negara menjadi terkuras.

"Karena itu sudah jadi temuan,

ya tentunya harus diusut dan kemudian perlu ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan," kata Firman, Selasa (30/1/2024).

Firman menjelaskan, dalam sistem pengadaan barang dan jasa itu sebenarnya sudah ada regulasi dan mekanismenya. Kalau dalam pelaksanaan regulasi dan mekanismenya tidak sesuai, tentunya akan menjadi temuan BPK. Temuan ini kemudian diklasifikasi oleh BPK, apakah pelanggarannya termasuk dalam klasifikasi berat, sedang, atau ringan.

Nah kalau klasifikasinya ringan, sambung politisi Golkar ini, maka biasanya, BPK hanya meminta kelebihan tersebut dipertanggungjawabkan atau dananya dikembalikan kepada Pemerintah. Namun rekomendasi

dari BPK juga akan menjadi berbeda jika kelebihan bayar ini disengaja.

"Kalau ada unsur kesalahan yang memang disengaja dan itu klasifikasinya berat, maka itu harus diproses," ujarnya.

Firman mengatakan, tindak lanjut temuan BPK ini juga tergantung proses di internal Kementerian, dalam hal ini, Inspektorat Jenderal (Itjen). Sebab biasanya, temuan yang bermasalah dalam pengadaan di Kementerian lebih dulu diselidiki melalui Itjen. Harus ada suatu upaya penerapan hukum untuk memastikan bahwa pengadaan di Kementerian tidak terulang.

"Nah rekomendasi BPK seperti apa. Kalau memang dianggap serius, ditindaklanjuti, tidak boleh dibiar kan lagi jika pengadaan ini termasuk penyimpangan terhadap keuangan negara," tambahnya.

Terpisah, salah satu anggota Rakyat Merdeka di internal Kementerian membenarkan temuan BPK dalam pengadaan eartag dan vaksin sapi di Ditjen PKH Kementerian. Hanya saja, dia mengaku lupa berapa pengembalian ke negara dalam pengadaan bermasalah tersebut.

"Tapi sepengetahuan saya, Itjen justru lebih besar (temuan kerugian negara) dari BPK. Angkanya di atas Rp 75 miliar," katanya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Ditjen PKH Kementerian Makmun menolak memberikan komentar terkait temuan BPK tersebut. Dia malah meminta persoalan ini ditanyakan langsung ke direktorat teknis.

"Mungkin ke Direktorat Teknis ya Pak. Mohon maaf kami sedang di lapangan semua," kata Makmun.

Dirjen PKH Kementerian Nasrullah juga menolak memberikan pernyataan atas temuan BPK tersebut. Dia meminta agar permasalahan tersebut ditanyakan ke Itjen Kementerian.

"Untuk lebih detail silakan dengan Itjen. Karena, kami hanya melaksanakan rekomendasi post audit pengadaan dalam keadaan tertentu," katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi

pengadaan sapi di Kementerian tahun anggaran 2020.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membenarkan, laporan dugaan korupsi sapi ini sudah masuk ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK sejak tahun 2020.

Menurut dia, pada tahun 2021 pimpinan KPK sudah memberikan surat disposisi ke bagian penindakan untuk menindaklanjuti laporan itu dengan melakukan penyelidikan. Namun rupanya, disposisi itu tidak pernah ditindaklanjuti.

"Ternyata itu tidak ditindaklanjuti, baru kemarin-kemarin kita perintahkan untuk diperintahkan (buat) sprinlidik (surat perintah penyelidikan)," ungkap Alex.

Meski begitu, Alex belum mau membuka secara detail tentang dugaan korupsi tersebut.

"Tentu saya tidak akan menyampaikan. Kami masih mencari. Penyelidik masih mencari peristiwa pidana, belum masih menyentuh pada orangnya atau orang yang diduga pelakunya. Akan didalami di proses penyelidikan," tuturnya. ■ KAL